

LAPORAN PENELITIAN



DINAMIKA PENDIDIKAN PADA MASA ORDE BARU (KEBIJAKAN DAOED JOSEOF DAN NUGROHO NOTOSUSANTO)

OLEH:

Sardiman AM, M.Pd
NIP. 195105231980031001
Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M. Pd
NIP. 19820704 201012 2004
Email: ariayuliatr@uny.ac.id

Penelitian ini dibiayai dengan dana DIPA
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
SK Dekan FIS UNY Nomor: 109 Tahun 2012 Tanggal 16 April 2012
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Nomor: 1117/UN34.14/PL/2012, April 2012

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2012**

DINAMIKA PENDIDIKAN PADA MASA ORDE BARU (KEBIJAKAN DAOED JOESOEUF DAN NUGROHO NOTOSUSANTO)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pendidikan pada masa Orde Baru, khususnya pada saat Daoed Joesoef dan Nugroho Notosusanto menjabat sebagai menteri. Penelitian ini berusaha untuk melihat keterkaitan kedua kebijakan Daoed Joesoef dan Nugroho Notosusanto.

Metode penelitian menggunakan metode sejarah kritis, dengan beberapa tahapan (1) Pemilihan objek, (2) Heuristik (menentukan sumber sejarahnya), (3) Kritik (mempelajari sumber sejarah), (4) Interpretasi, (5) Penulisan. Heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu wawancara dengan Daud Yusuf, dan penggunaan dokumen pribadi baik berupa foto maupun naskah. Penulis juga menggunakan sumber formal dan informal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Daoed Joesoef memiliki beberapa kebijakan pendidikan yaitu, pendidikan menjadi pusat budaya, membuka program S2 dan S3, dan yang paling fenomenal adalah normalisasi kehidupan kampus. Nugroho Notosusanto sebagai pengganti Daoed Joesoef memiliki kebijakan pendidikan yang condong militeris. Salah satu kebijakan yang paling fenomenal dari Nugroho Notosusanto adalah penerapan PSPB. Kebijakan pendidikan Daoed Joesoef tentang Normalisasi Kehidupan Kampus masih dilaksanakan pada masa Nugroho Notosusanto. Namun kedua menteri ini memiliki konsep pendidikan yang jauh berbeda. Beberapa kebijakan Daoed Joesoef terutama tentang normalisasi kehidupan kampus mendapat tantangan besar dari kalangan akademisi dan mahasiswa hingga terjadi demonstrasi. Pada saat Nugroho Notosusanto kebijakan dilaksanakan dengan gaya militer, misalnya guru harus menerapkan PSPB tanpa adanya buku panduan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pendidikan tentu saja tidak lepas dari kebijakan politik. Keterkaitan keduanya tidak dapat dipisahkan, maka sering muncul istilah “beda menteri beda kebijakan”. Memang sejatinya kebijakan dalam pendidikan di jaman yang serba kompleks dan berubah ini seyogianya harus menyesuaikan dengan tuntutan jaman. Namun, perubahan kebijakan pendidikan yang oleh pemegang kebijakan dari masa ke masa seperti tidak ada benang merah satu sama lain. Kebijakan satu menteri dengan menteri sebelum atau sesudahnya seakan-akan terkotak-kotak.

Akibat kebijakan yang tidak memiliki benang merah antara kebijakan menteri satu dengan menteri berikutnya, maka muncul pendapat yang mencurigai adanya praktek-praktek politisasi pendidikan, misalnya dengan sentralisasi kurikulum. Sentralisasi kurikulum dalam bidang pendidikan menunjukkan bukti bahwa pemerintah membuat kerangka politik yang subjektif untuk menyeragamkan pola pikir, sikap, dan perilaku.

Adalah fakta historis yang tidak dapat dipungkiri bahwa semenjak Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan tidak pernah terlepas dari intervensi dan politisasi. Kebijakan kurikulum terus silih berganti ketika paradigma pemegang kekuasaan selalu berubah sesuai dengan terminologi subjektifnya. Pada tahun 1945-1951, Sekolah Menengah Atas menggunakan kurikulum AMS (*Algemene Middelbare School*) yang merupakan warisan jaman Hindia Belanda (Asvi Warman Adam, 2005).

Kemudian pada tahun 1964, kebijakan kurikulum sangat bernuansa politis. Kurikulum gaya baru ini dijadikan ajang legitimasi kebijakan politik penguasa, yang berujung pada pembenaran-pembenaran sepihak terhadap teori kepemimpinan yang diterapkannya. Pada saat itu, pendidikan harus berlandaskan Pancasila dan Manipol (Manifesto Politik UUD 1945 yang terdiri dari Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sebenarnya, jika doktrin ini diterapkan sesuai dengan konsep teori awal, maka kebijakan ini sungguh dapat diterima dengan akal sehat, termasuk konsep “pendidikan terpimpin”.

Ketika kepemimpinan Soekarno runtuh, maka pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan kebijakan kurikulum, yakni dengan menerapkan kurikulum 1968. Kurikulum ini juga tidak terlepas dari muatan politik, meskipun sistem pendidikan sudah diarahkan untuk memperkuat keyakinan beragama.

Pada kurikulum 1975, materi pendidikan sejarah dijiwai oleh moral Pancasila, dan menekankan pentingnya nilai-nilai 1945 bagi generasi penerus bangsa (Asvi Warman Adam, 2005). Kurikulum berbasis Orde Baru ini juga hanya bertahan sembilan tahun, dan kemudian diganti dengan kurikulum 1984. Dalam kurikulum 1984, ditegaskan bahwa sektor pendidikan harus mendukung pembangunan bangsa di segala bidang. Untuk mendukung itu, maka peserta didik sebagai manusia pembangunan harus memiliki *nation hood* atau *nationalism*, memiliki kepribadian dan integritas bangsa, serta pembentukan *character building* secara komprehensif.

Politisasi pendidikan harus segera disudahi, terutama yang menyangkut adanya kepentingan-kepentingan politik di dalamnya. Dengan demikian, cara-cara berpikir baru dan terobosan-terobosan

baru harus segera diperkenalkan dan diciptakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, reformasi pendidikan dengan berbagai segmen-segmennya merupakan suatu kebutuhan dan juga suatu *imperative action*.

Selain itu, kebijakan pendidikan secara umum yang belum mengarah pada upaya tercapainya tujuan pendidikan nasional secara substansial, juga menjadi salah satu variabel yang turut menentukan. Sementara itu di tataran teknis, permasalahan juga sangat kompleks baik yang terkait dengan *input*, *transformasi*, maupun *output*. Untuk mengetahui secara objektif permasalahan-permasalahan ini, maka perlu kiranya dicari *black box* dari penyelenggaraan pendidikan sejarah tersebut. Jika sudah diketahui inti permasalahannya, maka tidak ada alasan bagi seluruh komponen sistem untuk menghindar dari permasalahan tersebut. Seluruh elemen yang terkait harus segera mencari solusi dan membuat paradigma baru yang lebih representatif, sehingga pendidikan dapat berjalan di atas pondasi nilai yang kokoh.

Fakta historis bahwa kebijakan pendidikan memerlukan paradigma baru yang dapat mengangkat derajat pendidikan. Namun, kebijakan itu tentu saja tidak boleh lepas secara historis dalam artian kebijakan pendidikan tidak boleh dilepaskan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Pembentukan kebijakan tanpa melihat fakta historis tentu saja akan menjadi perbaikan yang tanpa makna.

Penelitian ini menjadi penting untuk melihat kebijakan pendidikan yang secara historis dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan pendidikan kini dan masa depan. Riset ini mengkhususkan mengkaji kebijakan pendidikan masa Daoed Joesoef (29 Maret 1978-19 Maret 1983) dibandingkan dengan kebijakan pendidikan

Nugroho Notosusanto. Daoed Joesoef menjadi sosok yang unik dengan kebijakan normalisasi kebijakan kampus. Sedangkan Nugroho Notosusanto cukup berperan dengan kebijakan PSPB dan indoktrinasi militer. Melihat kebijakan Daoed Joesoef dan Nugroho Notosusanto dalam bidang pendidikan tidak hanya melihat mereka secara individu tetapi, melewati kebijakan merekalah dapat diungkap sisi politik, sosial dan budaya yang diusung pada era orde baru yang mewarnai pendidikan di Indonesia.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan dengan mempertimbangkan keterbatasan peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada kebijakan pendidikan pada masa Daoed Joseoef dan Nugroho Notosusanto.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana kebijakan pendidikan pada masa Daoed Joesoef ?
2. Bagaimana kebijakan pendidikan pada masa Nugroho Notosusanto?
3. Apakah ada keterkaitan kedua kebijakan pada masa Daoed Joesoef dan Nugroho Notosusanto?

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam usaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Perkembangan dunia makin memperkuat pandangan dan keyakinan tentang strategisnya peranan pendidikan sebagai faktor yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Pendidikan menurut KBBI (2008: 326) adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelorr.pok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan berbagai faktor yang berkaitan dengannya, dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Program peningkatan kualitas pendidikan adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional secara substantif, yang diwujudkan dalam kompetensi yang utuh pada diri peserta didik, meliputi kompetensi akademik atau modal intelektual, kompetensi sosial atau modal sosial dan kompetensi moral atau modal moral (Zamroni, 2005: 1). Ketiga modal dasar ini merupakan kekuatan yang diperlukan oleh setiap bangsa untuk mampu bersaing dalam era global.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti halnya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, pengembangan

materi pembelajaran, perbaikan sistem evaluasi, pengadaan buku dan alat-alat pelajaran, perbaikan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu pimpinan sekolah (Depdiknas, 2001: 3). Namun demikian, upaya tersebut sampai sekarang belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kualitas pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, seperti: guru, siswa, pengelola sekolah (Kepala Sekolah, karyawan dan Dewan/Komite Sekolah), lingkungan (orangtua, masyarakat, sekolah), kualitas pembelajaran, dan kurikulum (Edy Suhartoyo, 2005: 2).

Hal serupa juga disampaikan oleh Djemari Mardapi (2011: 8) bahwa usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. Meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Usaha peningkatan kualitas pendidikan akan berlangsung dengan baik manakala didukung oleh kompetensi dan kemauan para pengelola pendidikan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus menuju kearah yang lebih baik. Dengan demikian, inovasi pendidikan secara berkesinambungan dalam program pendidikan termasuk program pembelajaran merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan.

B. Orde Baru

Pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS dengan suara bulat mengeluarkan Ketetapan No. XXXIII. Sejak itu Soekarno dibebaskan dari tanggungjawab konstitusinya, dipecat fungsinya menjadi mandataris MPRS dan dilarang ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan politis (Malcolm Caldwell & Ernst Utrecht, 2011:

283). Sejak saat itu Soekarno digantikan oleh Soeharto, dimulailah babak baru yang sering kemudian dikenal dengan periode Orde Baru. Istilah Orde Baru sendiri muncul untuk menggantikan Orde Lama (istilah yang diberikan pada rezim Soekarno).

Pemerintah orde baru berusaha untuk melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Selain itu Orde Baru yang berkuasa sejak 1966, yang didukung oleh militer mampu mempertahankan struktur militernya yang represif dan restriksik. Sistem represif dan restrisik ini terasa dalam segala bidang termasuk dalam dunia pendidikan.

Menurut para ideolog Orde Baru, struktur politik dan prosedur yang berlaku pada Orde Baru mencerminkan pendekatan Indonesia yang unik pada pengambilan keputusan, salah satunya karena memberikan tempat yang terhormat bagi konsensus dan harmoni (David Baurchier, 2007:3). Konesus dan harmoni inilah yang membuat beberapa kebijakan pendidikan juga menjadi bagiannya.

Langkah awal Soeharto adalah membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Pembangunan Pertama. Lewat kabinet baru ini Soeharto mulai menata semua bidang kehidupan terutama dalam bidang ekonomi dan ideologi.

Pada pertengahan 1980an, para ideologi pemerintah mencoba mengabungkan kumpulan gagasan “indoktrinasi berskala nasional” kedalam teori negara yang bersifat koheren (David Baurchier, 2007:3). Indoktrinasi pemerintah orde baru ini dilakukan dengan cara sentralistik. Ideologi yang sentralistik ini tentu saja juga memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai bidang

termasuk dalam bidang pendidikan. Semua kebijakan pendidikan dilaksanakan dan dikontrol dari pusat.

Pembukaan Undang-undang Dasar yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama, merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah orde baru peduli dengan masalah pendidikan. Akan tetapi peran strategis pendidikan cukup disadari oleh pemerintah orde baru sehingga pendidikan tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah orde baru tidak lebih hanya menjadi alat politik saja. Fokus pembangunan pemerintah orde barupun lebih menitik beratkan dalam bidang ekonomi.

Pancasila dan P4 akhirnya menjadi salah satu kendaraan indoktrinasi politik. Pancasila benar-benar mendapat tempat istimewa buktinya siswa harus menghafalkan Pancasila tanpa tahu makna yang terkandung didalamnya dan bagaimana mengamalkannya.

Menurut Tilaar (2002: 3) pendidikan pada masa orde baru diarahkan pada penyeragaman didalam berfikir dan bertindak. Penerapan pendidikan tidak diarahkan pada peningkatan kualitas melainkan target kuantitas.

Kurang pedulinya pemerintah orde baru dalam pendidikan bisa dilihat pada awal 1980-an ketika terjadi krisis minyak yang mengganggu kestabilan ekonomi. Maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengurangi dana pendidikan. Sikap pemerintah orde baru ini juga sekaligus membuktikan bagaimana menempatkan lembaga pendidikan di bawah birokrasi negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sejarah, dengan tahapan (Louis Gottschalk, 2008: 42):

1. Heuristik (merupakan masalah dan menentukan sumber sejarahnya)
2. Kritik (mempelajari sumber sejarah)
3. Interpretasi
4. Penulisan

Tahapan heuristik atau pengumpulan sumber tidak jauh berbeda dengan kegiatan bibliografis yang lain, menyangkut buku-buku yang dicetak. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yang dimaksud adalah sumber yang diceritakan orang yang hidup pada periode yang sama dengan kejadian (sezaman) dan atau saksi mata (Gilbert J. Garraghan, 1957: 104). Sumber primer yang digunakan dalam riset ini terdiri dari dokumen sezaman, koran atau surat kabar sezaman (informal), dan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan Bapak Daoed Joesoef. Namun sayang, peneliti belum dapat melakukan wawancara dengan sumber-sumber lain karena keterbatasan kondisi.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dengan Daoed Joesoef (Jakarta). Sedangkan untuk melengkapi dokumen Nugroho Notosusanto akan dilakukan studi pustaka.

Sumber sekunder, sumber yang diproduksi oleh orang yang hidup setelah waktu kejadian, kejadian yang dilaporkan/kesaksian yang bukan merupakan saksi pandangan mata, orang yang tidak hadir dalam peristiwa tersebut (Suhartono W. Pranoto, 2010: 33) akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber sekunder yang diunakan meliputi buku-buku dan referensi terkait dengan tema penelitian ini.

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern (otensitas dokumen) dan kritik intern (kredebilitas isi dokumen). Setelah dilakukan intepretasi tahap berikutnya adalah historiografi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Daoed Joesoef: Pemikiran dan Kebijakan

1. Profil Singkat Daoed Joesoef

Bagian ini akan mengulas profil Daoed Joesoef, karena beberapa pikiran dan tindakan manusia ternyata tidak bisa lepas dari pengalaman, sosial, budaya, dan perjalanan kehidupan pribadi. Memahami perjalanan hidup Daoed Joesoef diharapkan dapat membantu untuk memahami beberapa kebijakan yang diambil.

Daoed Joesoef dilahirkan di Daerah Istimewa Aceh, tanggal 8 Agustus 1926. Namun, ia bertumbuh di Aceh bersama kedua orang tuanya. Ia tercatat menjadi anggota TKR-Divisi IV Sumatera Timur (1945-1946). Semangatnya untuk melanjutkan sekolahlah yang mengantarkan Daoed Joesoef hijrah ke Yogyakarta. Namun, karena terlambat mendaftar sekolah (sekolah sudah dimulai), maka Daoed Joesoef memutuskan untuk menunggu satu tahun ke depan.

Kota Yogyakarta menjadi tempat pertemuan dengan pelukis Hariadi yang tinggal di Jetis. Waktu itu Daoed Joesoef, Soeharto, Nasah Jamil diajak ke Solo untuk membentuk Seniman Indonesia Muda. Karena seniman-seniman tidak tahu Anggaran Dasar meminta bantuan saya untuk. Pengurus Pusat Sudjojono, wakilnya Basuki Resobowo. Cabang Pertama Madiun, dan Cabang Yogyakarta ketuanya Daoed Joesoef. Kegiatan SIM waktu itu difasilitasi oleh Sultan untuk menggunakan fasilitas milik kraton. Bergabung dengan SIM membuat bakat melukis Daoed Joesoef semakin terasah. Dalam bidang seni hal yang paling mengesankan bagi Daoed Joesoef

adalah membuat poster pada saat Agresi Militer Belanda I. Daoed Joesoef membuat poster perlawanan anti Sekutu dan Belanda, salah satu posternya berbunyi “Sopo Mateni Londo Mlebu Suwargo” (Wawancara Daoed Joesoef) (Wawancara Daoed Joesoef).

Namun, setelah dapat melanjutkan pendidikannya di Mulo (sekarang SMA 3 Yogyakarta) Daoed Joesoef memutuskan keluar dari SIM karena sudah merasa sudah memiliki kemampuan dalam bidang berkesenian. Selain itu, SIM sendiri mengadakan disiplin anggota untuk fokus berkesenian.

Selama bersekolah ia juga bergabung dengan Tentara Pelajar Brigade 17 Batalyon 300. Masuk jajaran TNI dan berdinasi di Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya (1950-1951).

Setelah lulus sekolah ia hijrah ke Jakarta melanjutkan sekolah di Universitas Indonesia (UI). Ketika menjadi mahasiswa, Daoed Joesoef sudah menjadi asisten dosen. Setelah lulus di Beliau menjabat sebagai Staf Pengajar FE-UI (1954-1963). Membentuk Jurusan Ekonomi Pemerintah di samping mengepalai Jurusan Ekonomi Umum di Fakultas Ekonomi. Pada tahun 1964, beliau meneruskan dua program S-3 di Universite Pluridisciplinaire de Paris I Pantheon-Sorbone, yaitu jurusan Keuangan Negara, Hubungan Internasional dan Finansial serta Hukum. Daoed Joesoef kuliah di Sorbone atas beasiswa lulus pada tahun 1972 (Daoed Joesoef, 2012: 337).

Pengalaman yang paling berkesan bagi Daoed Joesoef selama di Paris adalah ia mampu berkerjasama dengan UNESCO untuk merehab candi Prambanan. Bahkan pada saat itu Indonesia diberi sekretariat perwakilan di Paris oleh UNESCO. Salah satu yang mengelola sekretariat tersebut adalah Daoed Joesoef (Wawancara Daoed Joesoef).

Sepulang dari Sorbone, Daoed Josoef kembali ke Universitas Indonesia untuk mengajar di Fakultas Ekonomi. Namun, ia merasa beberapa cara pandang ia tentang ekonomi dan bangsa berbeda jauh dari teman-temannya yang lulusan Barkeley (Wawancara Daoed Joesoef).

Bagaimana Daoed Joesoef, seorang ilmuwan ekonomi bisa menjadi seorang menteri? Pertanyaan ini saya lontarkan ketika berbincang dengan beliau. Daoed Joesoef sendiri merasa bahwa bagaimana ia bisa diangkat menjadi Menteri Pendidikan dalam Kabinet Pembangunan III (1978-1983) merupakan sebuah misteri.

Namun, ia punya cerita yang barangkali ada kaitannya dengan pengangkatannya menjadi menteri pendidikan. Kuliahnya di Sorbone ternyata mempertemukan dengan Hatta (Proklamator) yang seang berobat jantung di Belanda, dan tengah berkunjung ke Sorbone untuk bernostagia. Mereka acapkali berdiskusi mengenai banyak hal. Sesudah selesai kuliah ia kembali ke Indonesia, akhir tahun 1972, Daoed Joesoef dipanggil ke rumah Hatta. Daoed Joesoef datang dengan membawa konsep ekonomi karena berfikir bahwa Hatta adalah seorang ekonom yang pastinya akan mengajaknya berdiskusi banyak hal tentang ekonomi. Tak diyana, sesampai di rumah Hatta sudah ada Sultah Hamengkubuwono IX yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Daoed Joesoef, terheran-heran lebih-lebih kala itu yang didiskusikan bukan tema ekonomi tapi tentang pembangunan dan pendidikan. Bahkan Daoed Joesoef masih ingat betul kalau Sultan HB IX kala itu sudah menanyakan tentang pendidikan karakter. Mereka berdiskusi tentang pendidikan dari jam 20.00 WIB sampai 23.30 WIB (Wawancara Daoed Joesoef).

Pada tahun 1978 sesudah pemilu, Presiden Soeharto memanggil Daoed Joesoef ke kediaman Cendana. Jam 4 sore, Daoed Joesoef sudah pulang ke rumah dan bersiap ke kediaman Cendana. Sang istri keheranan karena Daoed Joesoef bukan kebiasaannya pulang ke rumah di sore hari. Daoed Joesoef menjelaskan bahwa ia dipanggil ke Cendana, dan biasanya orang-orang yang dipanggil ke Cendana akan menjadi menteri. Sang istri berpesan kepada Daoed Joesoef “agar tidak masuk dalam kabinet kalau kepala kosong”. (Wawancara Daoed Joesoef). Dengan kata lain Daoed Joesoef, harus memiliki konsep yang jelas, yaitu pendidikan sebagai pertahanan, keamanan, dan strategi nasional (Wawancara Daoed Joesoef).

2. Pemikiran dan Kebijakan Daoed Joesoef

Ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan Daoed Joesoef mengalami banyak hal yang tidak mudah. Beberapa kebijakannya dirasakan terlalu keras. Namun, pada bab ini kebijakan Daoed Joesoef akan dilihat dengan kaca mata yang lebih dekat, dari kaca mata seorang Daoed Joesoef. Dengan demikian kita akan memahami beberapa hal yang barangkali dalam pelaksanaannya terasa kurang “pas”.

Bagi Daoed Joesoef menjadi menteri pendidikan sangatlah penting, karena hal ini erat kaitnya dengan generasi ke depan dan masa datang. Menteri Pendidikan menurut Daoed Joesoef memiliki tanggungjawab “manusiawi”, tidak hanya mengurus “human investment” tetapi membantu anak didik untuk dapat menunaikan tugas dengan baik tugas-tugas utama darimanusia (Daoed Joesoef, 1978: 4). Tugas utama tersebut meliputi (1) transformasi dirinya sendiri, (ii) auto-identifikasi mengenai dirinya, dan (iii) auto-pengertian mengenai dirinya. Dengan demikian, Daoed Joesoef menegaskan bahwa pendidikan

merupakan bagian dari kebudayaan bukan sebaliknya (Daoed Joesoef, 1978: 4)

Daoed Joesoef, memiliki konsep bahwa pusat kebudayaan adalah pola lingkungan sekolah-sekolah mulai SMTA ke bawah. Sekolah sebagai pusat budaya dimaksudkan, per-definisi, sekolah sebagai pusat-pusat nilai-nilai yang diepakati sebagai terpuji, dikehendaki, berguna serta perlu dipertaruhkan bagi kehidupan warga, masyarakat dan negara. Maka, sekolah sebagai pusat kebudayaan menjadi penting untuk membiasakan kepada anak didik untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan belajar mengamalkan pembelajaran di sekolah (Daoed Joesoef, 1982: 33).. Hal ini berarti output pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari anak. Sekolah dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan menurut Daoed Joesoef, apabila sekolah telah mampu menciptakan masyarakat belajar, meningkatkan mutu pendidikan, menjadi tauladan masyarakat sekitar an mampu membangun manusia secara utuh sesuai dengan jenjang sekolah itu sendiri (Daoed Joesoef, 1982: 33).

Menurut Daoed Joesoef (1982: 34), pokok pengembangan sekolah sebagai pusat budaya sebagai berikut:

a. Pengembangan logika

1. Gemar, biasa lalu butuh membaca
2. Rajin dan tekun belajar
3. Suka meneliti
4. Gairah menulis analitik

b. Pengembangan etika

1. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
3. Sopan santun serta berkepribadian
4. Berdisiplin

c. *Pengembangan estetika*

1. Apresiasi seni (menghargai kesenian)
2. Persepsi seni (dapat menikmati kesenian)
3. Kreasi seni (dapat menciptakan karya baru)

d. *Pengembangan praktika* (gabungan antara a, b, dan c)

1. Menghargai pekerjaan fisik daripada intelektual
2. Terampil dan cekatan
3. Penerapan teknologi.

Pemikiran tentang gagasan pendidikan bagian kebudayaan dan sekolah menjadi pusat kebudayaan sejatinya masih relevan bila kita adopsi saat ini sebagai upaya pendidikan karakter. Kesadaran Daoed Joesoef dalam bidang kebudayaan dan kesenian dalam bidang pendidikan barangkali dilandasi oleh jiwa estetika yang dimiliki oleh Daoed Joesoef yang seorang pelukis.

Dana pendidikan yang dikurangkan untuk pendidikan pada saat itu sejumlah 1,3 trilyun. Menggunakan dana yang ada Daoed Joesoef, kemudian melakukan banyak sekali kebijakan dari tingkat Taman Kanak-kanan (TK) sampai tingkat SMA. Berikut ini beberapa contoh perbaikan fisik maupun nonfisik yang dilakukan Daoed Joesoef selama menjadi menteri TK dan SMA hingga tahun 1982 ia membangun sekolah (16 TK, 667 SMP, 131 SMTA, 8 buah STM, 7 buah SLB) rehabilitasi kelas 8 ruang kelas, penataran terhadap 7.278 guru, pengadaan buku lebih dari 2,8 juta ekpelar, dan pengadaan alat peraga, pengadaan laboratorium, pembanguana Politeknik, pemberian bea siswa khususnya banyak diberikan untuk putra Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur dan lainnya (Daoed Joesoef, 1982: 9).

Selain perbaikan-perbaikan tersebut Daoed Joesoef juga aktif melakukan kegiatan pembinaan pendidikan guru dengan melakukan rehabilitasi ruang-ruang kelas Pusat Sumber Belajar

dan asrama siswa Sekolah Pendidikan Guru (SPG) sebanyak 91 buah, pengadaan buku pelajaran murid/guru SPG/Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB)/SGO, Pengadaan peralatan untuk SGO/SPG/SGPLB, Kursus Pendidikan Guru (KPG) dan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) (Daoed Joesoef, 1982: 12).

Usaha untuk memenuhi kekurangan tenaga guru juga dilakukan dengan diadakan program diploma pada 26 lembaga LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yaitu IKIP/FIKIP/FIP/KFG, Universitas Negeri maupun swasta. Untuk menambah kinerja guru maka diadakan program guru teladan, perpanjangan batas usia pensiun, guru swasta dijadikan pegawai negeri, pengangkatan guru-guru dari tamatan SPG (Daoed Joesoef, 1982: 14-15).

Menarik dicatat bahwa pada masa Daoed Joesoef, Indonesia juga menyumbangkan tenaga guru-guru ke Malaysia padahal saat itu tenaga guru di Indonesia terbatas. Jumlah delegasi guru untuk Malaysia sebanyak 70 orang dan dikirimkan pada akhir 1979. Setelah dikonfirmasi, Daoed Joesoef, menerangkan bahwa sumbangan guru-guru ke Malaysia adalah permintaan Soeharto (Wawancara Daoed Joesoef, 2012). Selain ditingkat Universitas Daoed Joesoef juga membuka program pendidikan S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Hal ini dilakukan agar ditingkat S2 mahasiswa dapat mendalami pengetahuan, dan ditingkat S3 bagaimana pengetahuan itu menjadi sebuah kebijaksanaan.

Daoed Joesoef nampaknya melakukan pembangunan pendidikan secara menyeluruh baik material maupun non material sesuai dengan teori Djemari Mardapi (2011: 8) Usaha peningkatan kualitas pendidikan akan berlangsung dengan baik manakala didukung oleh kompetensi dan kemauan para

pengelola pendidikan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus menuju kearah yang lebih baik. Dengan demikian, inovasi pendidikan secara berkesinambungan dalam program pendidikan termasuk program pembelajaran merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan.

Kebijakan Daoed Joeseof yang paling fenomenal adalah kebijakan pelaksanaan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Program ini adalah ide dari Daoed Joeseof yang ingin menjadikan Perguruan Tinggi sebagai jenjang pendidikan formal berdimensi pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Melalui penelitian, maka perguruan tinggi akan menghasilkan tenaga ahli dalam bidangnya masing-masing (Daoed Joeseof, Kompas 7 April 1978).

Daoed Joeseof juga menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggungjawab ensesial yaitu: (1) mempertahankan dan memelihara kesatuan dan persatuan Bangsa, (2) mengembangkan kepriadian sehat dan tangguh, berkemampuan berfikir analitis dan sisntesis, berilmu tinggi serta bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur, (3) meningkatkan partisipasi dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan, (4) memelihara dan mengembagkan Demokrasi Pancasila serta menjujung tinggi hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD, (5) mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur dan relevan guna mendorong masyarakat dan menampung perubahan serta pengembangan masyarakat yang postif dalam pembaharuan bangsa (Daoed Joeseof, Kompas 7 April 1978). Maka mahasiswa diharapkan mempunyai kekuatan penalaran untuk mengisi tekno-struktur, yang memiliki hakiki sebagai manusia penganalisis. Daoed Joeseof, menegaskan bahwa bukanya

mahasiswa tidak dapat melakukan aksi politik sebagai hakikat dari kepribadiannya, akan tetapi aksi politik dilakukan di luar kampus (Wawancara Daoed Joeseof). Menurut Daoed Joeseof, mahasiswa hendaknya berpolitik dalam artian konsep bukan politik dalam arti kebijakan dan penerapan politik.

Lebih lanjut Daoed Joeseof, mendefinisikan normalisasi kampus adalah redefinisi dari lembaga-lembaga kemahasiswaan secara mendasar dan fungsional dan bertahap, sehingga membantu mahasiswa untuk mewujudkan kekuasaan riil yang secara potensial dikandungnya. Untuk melancarkan program ini akan dilakukan pengembangan bidang-bidang mahasiswa baik bidang kesejahteraan, bidang minat mahasiswa, dan bidang pengembangan pemikiran mahasiswa.

Kebijakan normalisasi ini dipandang oleh beberapa kalangan termasuk mahasiswa sebagai upaya depolitisasi mahasiswa. Maka, terjadilah demonstrasi yang kemudian berujung pengungkapan mahasiswa, seperti mahasiswa di BaIPB, ITB, UI, dan mahasiswa dari Yogyakarta. Akibatnya Dewan Mahasiswa/Senat Mahasiswa dibekukan. Pelaksanaan NKK ini diserahkan kepada Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, laksamana Sudomo.

Kritik terhadap kebijakan ini tidak hanya dilontarkan oleh mahasiswa tetapi oleh beberapa ketua Rektorium, seperti Ketua Rektorium dari IPB, Prof. Dr. Satari yang menyatakan bahwa kontrol sosial mutlak diperlukan, meskipun DPR/MPR sudah mewakili sebagai wakil rakyat. Tetapi diperlukan dukungan dari perguruan tinggi (Kompas 4 April 1978).

Meskipun mendapat pertentangan dan Daoed Joeseof, harus menghadapi demonstrasi, normalisasi ini akhirnya dilaksanakan

juga, meskipun di setiap Universitas memiliki model yang beragam.

Pada tahun 1983, Daoed Joeseof, tidak mendapat kesempatan lagi untuk menjabat sebagai menteri pendidikan. Hal ini dikarenakan kondisi politik, isu agama, dan pribadi Soeharto yang tidak menyukai sikap Daoed Joeseof. Menurut keterangan dari Daoed Joeseof, kala itu Hamka (yang menjabat sebagai ketua MUI) datang ke kantor dan meminta hari Sabtu untuk pelajaran agama di setiap sekolah. Daoed Joeseof, menolak permintaan Hamka dengan alasan bahwa guru agama tidak memenuhi untuk mengajar di hari yang sama. Sejak saat itu Daoed Joeseof, dianggap anti Islam (Wawancara Daoed Joeseof). Kondisi yang lain adalah Soeharto tidak suka dengan kritik Daoed Joeseof, atas pembanguana ekonomi yang liberal. Maka, di periode berikutnya Daoed Joeseof digantikan oleh Nugroho Notosusanto.

B. Nugroho Notosusanto: Pemikiran dan Kebijakan

1. Profil Nugroho Notosusanto

Nugroho Notosusanto adalah seorang akademisi, militer, dan seorang sastrawan yang oleh HB Yasin digolongkan sebagai sastrawan angkatan 66. Nugroho lahir di Rembang pada tanggal 15 Juli 1931. Ia menjadi menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (1983-1985) yang menggantikan Daoed Joeseof. Karirnya sebagai menteri cukup singkat, karena ia mengalami pendahara otak yang merengut nyawanya pada 2 Juni 1985.

Perjalanan pendidikan Nugroho Notosusanto tidak jauh berbeda dengan Daoed Joeseof. Ia juga menyelesaikan sekolahnya di SMA Yogyakarta, se usai tamat dari Pati. Selama

tinggal di Yogyakarta ia bergabung dengan Tentara Pelajar (TP) Brigade 17 dan TKR Yogyakarta. Nugroho Notosusanto mengatakan bahwa selama di Yogyakarta, Daoed Joeseof adalah mentornya di SMA. Ia menceritakan kemesraannya dengan Daoed Joeseof, ketika berjalan dari rumah di Wirogunan ke Kota Baru Dengan berjalan kaki. Sambil berjalan mereka berdua selalu berdiskusi dan saking asyiknya berdiskusi sampai tersrempet becak atai gerobak. Nugroho juga menyampaikan dalam sambutannya sebagai menteri bahwa ia dan Daoed Joeseof, ikut gerakan bawah tanah Agresi Militer II dan akhirnya ditangkap dan disekap bersama-sama (Nugroho Notosusanto, 1983: 21)

Setelahnya ia juga menjadi mahasiswa Fakultas sastra, Jurusan Sejarah Universitas Indonesia. Pada tahun 1962 ia mendapat beasiswa di Universitas London. Pada tahun 1977 ia memperoleh gelar doktor dalam ilmu sastra bidang sejarah dengan tesis "The Peta Army During the Japanese Occupation in Indonesia" (<http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id>).

Pada tahun 1967, Nugroho mendapatkan pakat tituler berdasarkan SK Panglima AD No. Kep. 1994/12/67 berhubungan dengan tugas dan jabatannya pada AD. Pangkat terakhirnya adalah Brigadir Jenderal, pangkat tertinggi yang mungkin diraih dalam karier sipil di kemiliteran saat itu. Sejak tahun 1964, ia menjabat Kepala Pusat Sejarah ABRI (<http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id>)

Nugroho adalah seorang penulis yang produktif. Ia juga menulis sastra dan puisi.

2. Nugroho Notosusanto: Kebijakan dan Pemikiran

Pada awal menjabat sebagai menteri pendidikan, Nugroho sadar betul bahwa ia sebagai pembantu Mandataris Soeharto sebagai Presiden (Nugroho Notosusanto, 1983: 21). Nugroho banyak mengutip konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk menjelaskan tentang pendidikan. Ia menegaskan bahwa dasar pendidikan dan pengajaran adalah “kebangsaan Indonesia dalam arti luas”, dan harapan bahwa “endaknya selalu diusahakan memperbaiki pengaturan pengajaran, sehingga dapat mengetahui ukuran dan syarat-syarat internasional”, dan semua pengajaran hendaknya relevan dengan zaman (Nugroho Notosusanto, 1983: 26). Hal ini diartikan sebagai dasar bahwa beberapa akan diadakan pembaharuan kebijakan pendidikan.

Hakekat pendidikan dalam konsep Nugroho Notosusanto, adalah menyeimbangkan segi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ia mengibartkan hakekat pendidikan sebagai berikut:

“Jika seseorang kau beri seekor ikan, maka ia akan makan ikan sepanjang hari; jika seseorang kau ajarai menangkap ikan, maka ia akan makan ikan sepanjang hidupnya!’ [berarti] ...pendidikan tidak bersifat hanya memberi ikan belaka, namun juga bersifat mengajari bagaimana caranya menangkap ikan” (Nugroho Notosusanto, 1983: 26).

Perumpaan tersebut ia terapkan dalam konsep menyusun kurikulum, yaitu tidak boleh dijejali dengan ikan tetapi harus menangkap ikan, maka kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pada tataran teori pemikiran Nugroho Notosusanto tentang pendidikan sangat luar biasa. Hanya saja dalam praktiknya penyusunan kurikulum disesuaikan bukan atas dasar kebutuhan peserta didik, tetapi didasarkan pada kebutuhan penguasa, sebagai contoh hadirnya PSPB (Perjuanga Sejarah Perjuangan Bangsa) yang berisi dengan

sejarah militer dan legitimasi kekuasaan pada masa orde baru. Tujuan PSPB adalah memperluas dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 untuk generasi muda. Selain itu Nugroho berpendapat bahwa PSPB adalah pembelajaran untuk meningkatkan cinta kepada tanah air. Sambil menerapkan buku ajar PSPB yang belum jadi, guru sudah diminta untuk mengaplikasikan PPB tanpa buku ajar di tahun 1984 (Katharine E. Mc Gregor, 2008: 278). Mengajar tanpa buku ajar maka, banyak yang memlesetkan bahwa PSPB adalah “Pedoman Supaya Belajar Bingung.”

Pada saat sebelum menjabat sebagai menteri (1976) hal yang mendapat sorotan adalah dalam penyusunan buku sejarah Indonesia sebanyak 6 jilid. Nugroho Notosusanto tanpa meminta izin penulis mengadakan beberapa revisi, dan tanpa izin penulis tetapi dengan restu Bapak Soeharto menerbitkan buku *Sejarah Indonesia*. Hal ini juga yang menunjukkan kedekatan antara Nugroho Notosusanto dan Presiden Soeharto.

Selain PSPB, kebijakan Nugroho yang lain adalah pengembangan pendidikan pelaksanaan P-4, Pendidikan Moral Pancasila, serta pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang bersifat pengayatan.

Ketika ia menjabat sebagai menteri ia mengambil langkah-langkah khusus. Pertama, menugasi staf Pusat Sejarah ABRI untuk merumuskan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). PMP ini merupakan komponen yang disertai pendidikan P4. Salah satu kebijakan yang digagas oleh Daoed Joesoef tentang Normalisasi Kehidupan Kampus dilaksanakan oleh Nugroho.

Ditingkat Universitas Nugroho Notosusanto menghapus kegiatan-kegiatan pengenalan mahasiswa baru dan mengganti

dengan indoktrinasi Pancasila 100 jam (Katharine E. Mc Gregor, 2008: 290).

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini merupakan menelitian pendahuluan yang mengkadi pintu masuk untuk mengkaji lebih dalam dan koprehensif tentang keduanya. Kelemahan penelitian ini adalah keterbatasan dalam hal data, misalnya keterbatasan untuk mewawancarai pihak-pihak lain seperti mahasiswa dalam kasus Normalisasi Kehidupan Kampus atau tokoh lainnya yang terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Daoed Joesoef memiliki beberapa kebijakan pendidikan berkebudayaan dan seklah menjadi pusat budaya, membuka S2 dan S3, dan yang paling fenomenal adalah normalisasi kehidupan kampus. Nugroho Notosusanto sebagai pengganti Daoed Joesoef memiliki kebijakan pendidikan yang condong militeris. Salah satu kebijakan yang paling fenomenal dari Nugroho Notosusanto adalah penerapan PSPB. Kebijakan pendidikan Daoed Joesoef tentang Normalisasi Kehidupan Kampus masih dilaksanakan pada masa Nugroho Notosusanto. Namun kedua menteri ini memiliki konsep pendidikan yang jauh berbeda.

Beberapa konsep sekolah sebagai pusat budaya (Daoed Joesoef) menurut peneliti memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu alternatif pendidikan karakter pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asvi Warman Adam (Pengantar) dalam Sam Winerburg. (2006). *Berpikir Historis*. Jakarta: Obor.
- Daoed Joesoef. (1978). *Kumpulan Pidato Menteri Daoed Joesoef*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. (1982). *Membina Lingkungan Sekolah dan Ketahanan Sekolah*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. (2012). *Pikiran dan Gagasan Daoed Joesoef: 10 Wacana tentang Aneka Masalah Kehidupan Bersama*. Jakarta: Kompas.
- David Bouchier. (2007). *Pancasila Versi Orde Baru; dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*. Yogyakarta: PSP UGM bekerjasama dengan PSSAT dan P2D.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
- Djemari Mardapi. (2011). *Pengembangan instrumen dan Kisi-kisinya*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Edy Suhartoyo. (2005). *Pengalaman peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan budaya sekolah di SMAN 1 Kasihan Bantul*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pengembangan Budaya Sekolah, tanggal 23 November 2005 di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gilbert J. Garraghan, S.J. (1957). *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.

Katharine F. Mc. Grgregor (2008). *Ketika Sejarah Berseragam*. Yogyakarta: Syarikat.

Louis Gottschalk. (2008). *Mengerti Sejarah*. Nugroho Notosusanto (terj.). Jakarta: UI Press.

Malcolm Caldwell & Ernst Utrecht. (1979). *Sejarah Alternatif Indonesia*. Yogyakarta: Djaman Baroe.

Nugroho Notosusanto. (1985). *Mengemban Masa Depan: Kumpulan Sambutan*. Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Zamroni, (2005). *Mengembangkan kultur sekolah menuju pendidikan yang bermutu*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengembangkan Kultur Sekolah diYogyakarta pada tanggal 23 Nopember 2005.

www. keputakaan-presiden.pnri.go.id [Online] diakses pada tanggal 5 Oktober 2012.

Koran

Kompas 4 April 1978

Daoed Joesoef, Kompas 20 April 1978.

Wawancara

Daoed Joesoef pada tangga 1 November 2012.